PENGUKURAN KINERJA DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON

Syifa Dwi Aulia¹; Candradewini²

^{1,2}Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran,
Bandung, Indonesia

Email : ¹syifa19018@mail.unpad.ac.id; ²candradewini@unpad.ac.id

ABSTRACT

Performance measurement is used as an assessment of the final results of the implementation of activities against targets and goals. The results of the performance assessment of the Cirebon City Environment Service for 2020 - 2021 still show that they have not yet reached the "A" category. As it should performance measurement can help improve government performance. So the purpose of this study is that researchers want to know the implementation of performance measurement in the Cirebon City Environment Service. Researchers used qualitative methods with a descriptive approach. The author collects data by means of observation, interviews determined by the informants through a purposive sampling approach. Then perform data analysis by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of his research found that the agency conducts performance measurements, namely in the form of performance reports that measure office performance targets and performance measurements for achieving organizational targets. Monitor based on Renja's evaluation of work planning. It can be concluded that the agency is quite suitable in carrying out performance measurement, but still has not maximized performance measurement with this approach value for money.

Keywords: *Measurement, Performance Measurement, Cirebon City Environment Service*

ABSTRAK

Pengukuran kinerja dijadikan penilaian hasil akhir atas pelaksanaan kegiatan terhadap target dan tujuan. Hasil penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2020 - 2021 masih menunjukkan belum mencapai kategori "A". Sebagaimana seharusnya melakukan pengukuran kinerja dapat membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Sehingga tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui pelaksanaan pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara yang ditentukan informannya melalui pendekatan *purposive sampling*. Kemudian melakukan analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya ditemukan dinas melakukan pengukuran kinerja yaitu berupa dalam bentuk laporan kinerja yang mengukur target kinerja dinas dan pengukuran kinerja untuk pencapaian target sasaran organisasi. Serta pengukuran kinerja dengan evaluasi dan *monitoring* berdasarkan evaluasi Renja atas perencanaan kerja. Dapat disimpulkan bahwa dinas cukup sesuai dalam melaksanakan pengukuran kinerja, namun masih belum memaksimalkan pengukuran kinerja dengan pendekatan *value for money*.

Kata Kunci: Pengukuran, Pengukuran Kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik adalah organisasi yang dijalankan tidak mencari keuntungan (*non-profit oriented*). Organisasi publik mempunyai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Adapun sumber pendanaan yang didapatkan dari penerimaan pajak, retribusi, hibah, atau sumbangan lainnya. Selain itu, sumber pendanaan dalam organisasi sektor publik bisa berupa subsidi, iuran anggota, atau sumbangan dari donatur (Nordiawan & Hertianti, 2018).

Pemerintah membuat regulasi terkait otonomi daerah yaitu pemberian otonomi luas kepada daerah dengan mempunyai tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengatur dalam pembagian keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas (Nordiawan & Hertianti, 2018). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dituntut untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan sampai dengan pertanggungjawabannya.

Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan pada organisasi publik untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dapat dilakukan dengan cara pengukuran. Seperti yang kita ketahui bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan penyusunan anggaran berdasarkan berbasis kinerja. Maka dari itu, pengukuran tidak hanya diukur berdasarkan aspek keuangan, tetapi juga harus diukur berdasarkan kinerjanya. Sebuah pelaksanaan yang dilakukan pemerintah ini, menjadi pertanyaan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan manajemen pelayanan publik serta penggunaan anggaran belanja daerah (Sadjiarto, 2000). Masyarakat ingin mengetahui akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas bukan hanya kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan dalam membelanjakan uang publik tersebut secara

ekonomis, efisien, dan efektif (Mardiasmo, 2018). Selain itu juga, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan atas aktivitas yang telah dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagaimana pengukuran kinerja diperlukan untuk mengukur bagaimana kinerja organisasi sektor publik untuk menilai akuntabilitas organisasi publik dalam menghasilkan pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran (Krisanty et al., 2022).

Pengukuran kinerja adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dalam proses pengukuran kinerja melalui pendekatan *value for money* terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Nordiawan dan Hertianti, 2018). Pendapat lain, menurut Mardiasmo (2018) bahwa pengukuran kinerja mempunyai maksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon telah mendapatkan hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh inspektorat daerah, dalam bentuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Nilai akuntabilitas yang didapatkan dengan data sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tahun Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja
2020	66,49	B
2021	75,46	BB

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Data diatas hasilnya masih menunjukkan belum mencapai kategori "A" (>80,00). Hasil akhir penilaian tersebut merupakan penilaian keberhasilan atau kegagalan dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang dinilai dari beberapa komponen penilaian.

Adapun rincian komponen penilaian evaluasi kinerja di tahun 2021 yang digambarkan dalam tabel, berikut ini:

Tabel 1.2 Penilaian Kinerja Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	23,93
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	19,38

3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,22
4.	Evaluasi Internal	10,00	7,56
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20,00	13,3
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,46
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 2021

Data diatas menunjukkan sistem akuntabilitas kinerja yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2021 yaitu mendapatkan nilai tingkat akuntabilitas kinerja sebesar 75,46 (BB). Sebagaimana penilaian tersebut merupakan sebuah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan atas aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja organisasi itu sendiri. Dalam hal ini, pentingnya dalam melakukan pengukuran kinerja dengan tujuan untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang sehingga dengan mudah melakukan *monitoring* perkembangan pencapaian strategi (Mardiasmo, 2018).

Pada penelitian Krisanty et al., (2022) pengukuran kinerja menggunakan *value for money* menunjukkan bahwa aspek *value for money* terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pelayanan sektor publik di Kantor Kepala Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. Penelitian lain yang dilakukan oleh Marsus (2022) tentang hasil evaluasi atas jenis ukuran kinerja yang menunjukkan bahwa nilai desain pengukuran kinerja Dinkes Kabupaten Garut masih belum baik karena dinas tersebut baru menggunakan ukuran kinerja berbasis *output*, belum mengintegrasikan ukuran kinerja efisiensi dan baru menggunakan satu ukuran kinerja *outcome* yaitu mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat. Peneliti Rumagit et al., (2022) melakukan pengukuran kinerja program kegiatan Dinas Pariwisata Kota Manado pada tahun 2020 dengan menggunakan konsep *value for money* menunjukkan hasilnya bahwa dinas telah memenuhi pengukuran *value for money*. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pengukuran kinerja seperti *value for money* mempunyai pengaruh terhadap kinerja pelayanan sektor publik, tetapi hasil

penelitian lain dalam pelaksanaannya masih menunjukkan belum baik karena masih ada salah satu aspek yang belum terpenuhi.

Pengukuran kinerja menjadi salah satu faktor untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Dengan adanya pengukuran kinerja dapat dijadikan evaluasi dan perencanaan penganggaran berbasis kinerja pada organisasi publik tahun selanjutnya. Sebagaimana pengukuran kinerja dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja, seperti pelaporan informasi kinerja ini menjadi penting karena informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi, dan akuntabilitas publik (Nordian dan Hertianti, 2018). Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengukuran kinerja Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon?

METODE

Penulis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif sebagai penulisan dalam artikel ini, alasan dibalik memilih kualitatif deskriptif adalah penulisan yang berupaya untuk mendeskripsikan dan menafsirkan dengan pandangan yang sedang berkembang maupun proses yang berlangsung (Sumanto, 1990). Didasari juga pada kebutuhan penulis untuk mengetahui pelaksanaan pengukuran kinerja dengan mendapatkan fakta yang terjadi dilapangan tentang pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

Penggunaan metode ini mempunyai tujuan untuk membuat hasil deskriptif, gambaran yang sistematis, akurat dan aktual tentang fakta-fakta, serta sifat dan hubungan antarfenomena yang dimiliki (Nazir, 2009). Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber data lapangan dan data sekunder sebagai penunjang data primer yang diperoleh dari dokumen, literatur ilmiah, buku-buku, dan referensi yang berhubungan dengan pengkajian ini.

Kemudian penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara yang ditentukan informannya melalui pendekatan *purposive sampling*

sebagaimana informan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan. Serta dengan dokumentasi. Setelah pengumpulan data selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan bagaimana pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pengukuran kinerja dilakukan oleh Sub Program dan Pelaporan. Sebagai yang mempunyai kewenangan dalam pengukuran kinerja menyatakan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terdapat dua bentuk yaitu dalam

dilakukan, penulis melakukan analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2014)

bentuk LKIP dan Renja. Pertama, pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LKIP) berisi tentang pengukuran tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dan mengevaluasi target anggaran dengan realisasinya. Adapun hasil didalam LKIP dalam mengukur efektivitas atau efisiensi dengan melakukan perbandingan antara target kinerja dengan target keuangan. Berikut ini hasil observasi isi dokumen LKIP Tahun 2021 dalam pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, yaitu:

Gambar 1.1 Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran DLH Kota Cirebon Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		%	Keuangan		%	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi		Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Sasaran Strategis RPJMD Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim				110,80%				
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	46	55,7	121,09%				
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5,87	5,9	100,51%				
2.	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	persentase sampah yang terkelola (sampah terkurang ditambah dengan sampah tertangani)	98	82,92	84,61%	26.340.915.887	17.214.893.190	65,35%	19,26%
3.	Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%)(persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,75	10	132%	2.586.488.623	2.470.035.850	95,50%	36,71%
4.	Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	84,03	109,13%	24.104.309.636	23.444.054.654	97,26%	11,87%

Sumber : LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2021

Dapat dilihat gambar diatas, pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan pengukuran tingkat efisiensinya. Namun, didapatkan pengukuran kinerja ekonomi tidak dilakukan, tetapi dinas melakukan pengukuran seperti efektivitas dan efisiensi dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan realisasi target kinerja (wawancara, 2022).

Selanjutnya, kedua yaitu evaluasi Renja, berdasarkan hasil wawancara yang mempunyai kewenangan pengukuran kinerja menyatakan bahwa evaluasi Renja yaitu evaluasi yang dilakukan dengan melihat

evaluasi antara target dengan realisasi anggaran yang telah dialokasikan untuk program kegiatannya yang masih menggunakan pagu pada saat perencanaan, bukan pagu yang ditetapkan. Contoh dalam evaluasi Renja ini yaitu dari sisi keuangan misalnya yang menargetkan anggaran 10 Miliar, kemudian realisasi anggarannya 5 Miliar. Jadi, untuk evaluasi Renja ini yaitu membandingkan perencanaan untuk target dengan realisasi pelaksanaan.

Pelaksanaan evaluasi Renja ini dalam 1 Tahun dilakukan 4 kali evaluasi Renja atau per triwulan. Pengukuran kinerja yang dilakukan

per triwulan sebagai evaluasi dan *monitoring* untuk melihat progres ketercapaiannya. Penulis melakukan observasi dokumen evaluasi Renja triwulan 4 bahwa dalam laporan tersebut juga terdapat evaluasi dari setiap Bidang dan UPT atas permasalahan pelaksanaan kegiatan beserta pemecahan masalah.

Penulis juga melakukan observasi dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup

Tahun 2021 bahwa isi dokumen tersebut dalam pengukuran kinerja yang dilakukan oleh DLH Kota Cirebon yaitu:

1. Pengukuran kinerja DLH ialah pengukuran tujuan, sasaran yang terdapat indikatornya terhadap realisasi pencapaiannya di tahun tersebut. Berikut ini gambar pengukuran kinerja:

Gambar 1.2 Pengukuran Kinerja DLH Kota Cirebon 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	46	55,70
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	5,87	5,9
		Cakupan pelayanan pengelolaan sampah	persentase sampah yang terkelola (sampah berkurang ditambah dengan sampah tertangani)	98,00	82,92
		Peningkatan daya dukung lingkungan, ketahanan iklim dan pelestarian keseimbangan ekosistem, kehati serta keberadaan sumber daya alam	Persentase tingkat pencemaran lingkungan (jumlah persentase pencemaran air dan udara dibagi 2 dikali 100%) (persentase pencemaran = jumlah parameter diatas BML/parameter total BML dikali 100%)	14,75	10,00
	Meningkatnya kinerja pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	84,03	

Sumber: LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2021

2. Kemudian untuk mencapai sasaran tersebut dinas merealisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan begitu dilakukannya pengukuran kinerja yaitu berupa IKU (indikator kinerja utama) seperti: indeks kualitas lingkungan (IKLH), cakupan pelayanan pengelolaan sampah, tingkat pencemaran, dan terdapat pengukuran indeks kepuasan masyarakat.
3. Pencapaian realisasi anggaran (%) untuk program dan kegiatan.
4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, sebagai pengukuran untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran

tersebut dengan menyandingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target.

Hasil pengukuran kinerja yang dijadikan dalam bentuk dokumen laporan berbasis kinerja atau LKIP ini mempunyai fungsi sebagai bentuk evaluasi dan analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon. Pengukuran kinerja merupakan sebagai penilaian kinerja yang dijadikan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dalam periode satu tahun. Menurut Hadiwijoyo & Anisa (2019) bahwa aspek pengukuran kinerja menjadi salah satu tahapan pada penganggaran berbasis kinerja. Pengukuran kinerja yang sebagai alat untuk

evaluasi yang dijadikan sebagai penilaian kinerja untuk menilai berhasil atau tidak suatu organisasi menjalankan program kegiatan dalam satu tahun. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan dinas berupa:

1. Pengukuran kinerja yang dijadikan dalam bentuk laporan kinerja (LKIP) merupakan hasil laporan berbasis kinerja yang mengukur target kinerja dinas dan pengukuran kinerja untuk pencapaian target sasaran organisasi yang terdapat indikator kinerja. Hal tersebut sesuai dengan teori Nordiawan dan Hertianti (2018) bahwa pengukuran kinerja adalah sebuah alat yang digunakan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target dan tujuan kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Didalam laporan kinerja ini terdapat akuntabilitas keuangan berupa realisasi anggaran dan analisis efisiensi pencapaian kinerja terhadap anggaran. Dinas telah membuat laporan didalamnya hasil pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran. Sebagaimana menurut Mardiasmo (2018) bahwa tujuan sistem pengukuran kinerja itu sendiri yaitu untuk mengukur kinerja finansial yang diukur berdasarkan analisis perbandingan antara kinerja aktual (realisasi) dengan yang dianggarkan (target).

Selanjutnya, dalam isi laporan kinerja dinas melakukan pengukuran efektivitas dan efisiensi mengukur antara pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran. Tetapi belum sepenuhnya melakukan pengukuran kinerja *value for money* (ekonomis, efisiensi, efektivitas) yang merupakan sangat terkait yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan pengukuran aspek *value for money* dapat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan sektor publik (Krisanty et al., 2022). Apalagi dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja yang

menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja *ouput* (Mardiasmo, 2018).

2. Pengukuran kinerja yang dilakukan berdasarkan evaluasi Renja merupakan evaluasi atas perencanaan kerja. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan pagu awal yang direncanakan, bukan melakukan evaluasi atas pagu yang sudah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan per triwulan.

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan sebagai informasi kinerja yang menjadi pertimbangan untuk perencanaan selanjutnya. Sebagaimana informasi kinerja merupakan sebagai pertimbangan dan evaluasi atas pengukuran kinerja yang akan memberikan gambaran substansial dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan (nordiawan dan hertianti, 2018).

SIMPULAN

Penulis telah melakukan pemaparan diatas, dapat disimpulkan hasil analisis penulis yaitu dinas melakukan pengukuran kinerja terhadap tujuan dan sasaran, pencapaian realisasi anggaran dalam bentuk persentase atau akuntabilitas keuangan, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Juga melakukan pengukuran sekaligus *monitoring* terhadap Renja dengan menggunakan pagu awal yang direncanakan, bukan pagu yang sudah ditetapkan. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon telah memenuhi segala indikator dalam melaksanakan pengukurannya. Tetapi pelaksanaan proses pengukuran kinerja dengan pendekatan *value for money* yang terdiri dari ekonomi, efisiensi, dan efektivitas menunjukkan hasil yang belum maksimal melakukan pengukurannya karena tidak melakukan pengukuran salah satu indikator yaitu ekonomi.

Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Research Design*. In *Sage Journal* (Vol. 4). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Krisanty, M., Dewi, M. W., & Ma'ruf, M. H. (2022). Evaluasi Konsep Value for Money terhadap Penilaian Kinerja

DAFTAR PUSTAKA

- Cirebon, D. L. H. K. (2021). *Laporan Akuntabilitas Dan Kinerja Instansi Pemerintah 2021*.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2019). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah*. Rajawali Pers.

- Pelayanan Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(3), 141–147.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.